

Evaluasi Tingkat Integrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan Spasial dalam Mendukung Pembangunan Kota Malang yang Berkelanjutan

Gloria Aprillianti Suryaretnaningtyas¹⁾ and Kevie Desderius^{2),3)}

¹⁾ Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang

²⁾ Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

³⁾ Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, UKWM Surabaya

^{a)}Corresponding author: 2324035@student.itn.ac.id

^{b)}kevie.desderius-2023@pasca.unair.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan di Kota Malang mensyaratkan sinergi yang kuat antara tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial agar pertumbuhan kota dapat berlangsung secara seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat integrasi antara kebijakan tata kelola pemerintahan dengan perencanaan spasial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Malang. Metode yang digunakan berupa pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD, dalam penelitian ini juga menggunakan sistem skoring untuk mengetahui intergrasinya antar dokumen pembangunan, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kota Malang telah memiliki instrumen perencanaan yang komprehensif, koordinasi lintas sektoral dan konsistensi implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Penguatan integrasi dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data spasial berkualitas tinggi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan demikian, penguatan sinergi tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Kota Malang yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Integrasi ; Tata Kelola Pemerintahan ; Perencanaan Spasial ; Pembangunan Berkelanjutan ; Kota Malang

ABSTRACT

Sustainable development in Malang City requires strong synergy between governance and spatial planning to ensure balanced urban growth across economic, social, and environmental aspects. This study aims to analyze the level of integration between governance policies and spatial planning in supporting sustainable development in Malang City. The method used is a descriptive-qualitative approach through the analysis of planning documents such as the RTRW and RPJMD. This study also uses a scoring system to determine the integration between development documents, as well as in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the study indicate that although Malang City already has comprehensive planning instruments, cross-sectoral coordination and consistency of policy implementation still need to be improved. Strengthening integration can be achieved through increasing institutional capacity, utilizing high-quality spatial data, and increasing community participation in the planning process. Thus, strengthening the synergy between governance and spatial planning is key to realizing inclusive, adaptive, and sustainable development in Malang City.

Keywords: Integration ; Governance ; Spatial Planning ; Sustainable Development ; Malang City

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam pengembangan kawasan perkotaan modern di berbagai belahan dunia (Izzuddin, 2022). Paradigma ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup dalam satu tarikan napas pembangunan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh kota-kota yang sedang berkembang pesat adalah menjaga agar akselerasi fisik tidak mengorbankan daya dukung ekologis wilayah tersebut (Rahmani et.al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kota tidak lagi

hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, melainkan bagaimana kota tersebut dapat tumbuh secara seimbang dan inklusif.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, diperlukan fondasi manajerial dan teknis yang kokoh dalam sistem pemerintahan daerah (Maisarah, et.al., 2025). Sinergi yang kuat antara tata kelola pemerintahan (governance) dan perencanaan spasial menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi (Pratama et.al., 2025). Tata kelola pemerintahan menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi, sementara perencanaan spasial menerjemahkannya ke dalam alokasi ruang fisik yang tertib (Hasddin et.al., 2024). Tanpa adanya keterpaduan antara kedua aspek ini, arah pembangunan kota akan kehilangan orientasi dan berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

Namun, dalam praktiknya, integrasi antara kebijakan tata kelola dan rencana tata ruang sering kali menghadapi hambatan struktural maupun fungsional (Thahir, 2023). Banyak pemerintah daerah yang menjalankan perencanaan pembangunan dan perencanaan ruang seolah-olah sebagai dua entitas yang terpisah dan tidak saling berdialog. Fenomena ini mengakibatkan ketidaksinkronan program kerja antar dinas yang berujung pada inefisiensi anggaran dan ketidakeraturan tata ruang kota (Tifani, 2025). Kondisi disharmoni kebijakan ini menjadi isu krusial yang harus segera diidentifikasi akar permasalahannya agar tidak menghambat kemajuan daerah.

Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, tidak luput dari dinamika permasalahan urbanisasi dan tantangan pengelolaan ruang tersebut (Rahmawati et.al., 2024). Kota ini memiliki instrumen perencanaan yang sebenarnya sudah cukup komprehensif, baik dari sisi regulasi tata ruang maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Meskipun demikian, keberadaan dokumen legal formal tersebut belum sepenuhnya menjamin terciptanya pembangunan yang tertib di lapangan (Rice et.al., 2022). Masih terdapat indikasi kesenjangan antara apa yang tertulis dalam dokumen perencanaan dengan realisasi pembangunan fisik yang terjadi sehari-hari.

Permasalahan mendasar yang teridentifikasi di Kota Malang adalah lemahnya koordinasi lintas sektoral di antara para pemangku kepentingan (Yuliana, 2025). Sering kali, ego sektoral antar instansi pemerintah menjadi penghambat utama dalam menerjemahkan rencana spasial menjadi aksi pembangunan yang konkret (Widnyani, 2025). Selain itu, konsistensi implementasi kebijakan juga masih menjadi catatan evaluasi yang perlu ditingkatkan secara serius oleh pemerintah kota. Akibatnya, potensi integrasi antara tata kelola dan tata ruang belum tergarap secara optimal untuk mendukung keberlanjutan kota.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis tata ruang atau aspek administrasi publik secara terpisah, tanpa melihat irisan di antara keduanya (Suharto & Tiemority, 2021). Kajian yang secara spesifik membedah "tingkat integrasi" substansi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen tata ruang masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana kedua instrumen ini saling mengikat dan melengkapi sangatlah vital bagi perumusan kebijakan kota. Ketiadaan analisis yang mendalam mengenai simpul integrasi ini menyebabkan solusi yang ditawarkan sering kali bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah (Zhang, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis dengan memfokuskan kajian pada sinergitas kebijakan di Kota Malang. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis tingkat integrasi antara kebijakan tata kelola pemerintahan dengan perencanaan spasial yang ada saat ini. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memotret seberapa jauh komitmen pembangunan berkelanjutan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan spasial.

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hasil temuan di lapangan nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dalam koordinasi lintas sektor. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana pemanfaatan data spasial berkualitas tinggi dapat

menjadi solusi teknis untuk menjembatani kesenjangan perencanaan. Hal ini krusial mengingat data yang akurat adalah basis utama pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Selain aspek teknis dan kelembagaan, penelitian ini juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel penting dalam persamaan integrasi tata kelola. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan diyakini dapat meningkatkan rasa memiliki dan kontrol sosial terhadap pembangunan kota. Pelibatan publik yang lebih luas akan memastikan bahwa perencanaan spasial tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi lokal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penguatan sinergi tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial adalah kunci untuk mewujudkan Kota Malang yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan menguraikan kompleksitas hubungan antar variabel tersebut secara mendalam. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi perbaikan sistem perencanaan kota di masa depan. Dengan demikian, cita-cita pembangunan berkelanjutan di Kota Malang dapat terealisasi secara nyata dan terukur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena integrasi antara tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial secara mendalam. Prosedur penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan kompleksitas hubungan antar variabel pembangunan berkelanjutan di Kota Malang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tingkat integrasi substansi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen tata ruang yang ada saat ini.

Desain Penelitian dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama untuk memastikan validitas informasi:

- Studi Dokumentasi: Melakukan telaah kritis terhadap dokumen legal formal utama, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang. Analisis dokumen difokuskan pada kesesuaian visi, misi, dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Instrumen dan Analisis Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara dan tabel tabulasi data hasil analisis dokumen. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

1. Analisis Komparatif: Membandingkan substansi visi, misi, dan strategi antar dokumen (RTRW, RPJMD, dan KLHS) untuk melihat tingkat konsistensi serta irisan kebijakan yang ada.
2. Identifikasi Variabel Integrasi: Menganalisis faktor-faktor kunci seperti kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data spasial berkualitas tinggi, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
3. Analisis Deskriptif-Kualitatif: Mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks atau tabel, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai tingkat integrasi pembangunan Kota Malang.

Melalui prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memotret seberapa jauh komitmen pembangunan berkelanjutan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan spasial dan tata kelola pemerintahan di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kota Malang saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan pemanfaatan ruang, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai kota pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi di wilayah Malang Raya, Kota Malang

membutuhkan arah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tantangan mendasar yang teridentifikasi adalah lemahnya koordinasi lintas sektoral dan adanya ego sektoral antar instansi yang menghambat realisasi rencana spasial menjadi aksi konkret.

Oleh karena itu, integrasi antara tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Integrasi ini ditelusuri melalui keterkaitan antara tiga dokumen utama berikut:

Kondisi Eksisting dan Tantangan Pembangunan

Pembangunan Kota Malang saat ini berada pada fase yang krusial dengan tantangan yang semakin kompleks, mencakup pertumbuhan penduduk yang pesat, tekanan pemanfaatan ruang yang tinggi, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pusat pendidikan dan aktivitas ekonomi utama di wilayah Malang Raya, Kota Malang memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Tanpa adanya keterpaduan yang kuat, akselerasi pembangunan fisik dikhawatirkan akan mengorbankan daya dukung ekologis wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika perkotaan saat ini, ditemukan tiga tantangan utama yang menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan:

- **Ego Sektoral dan Lemahnya Koordinasi:** Hambatan utama yang teridentifikasi adalah lemahnya koordinasi lintas sektoral di antara para pemangku kepentingan. Ego sektoral antar instansi pemerintah sering kali menjadi penghalang dalam menerjemahkan rencana spasial menjadi aksi pembangunan yang konkret di lapangan. Kondisi ini menyebabkan instansi cenderung bekerja secara parsial tanpa melihat irisan kebijakan yang saling berkaitan.
- **Kesenjangan Implementasi Kebijakan:** Meskipun Kota Malang telah memiliki instrumen perencanaan yang komprehensif seperti RTRW dan RPJMD, keberadaan dokumen legal formal tersebut belum sepenuhnya menjamin ketertiban pembangunan. Terdapat indikasi kesenjangan (gap) yang nyata antara apa yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi pembangunan fisik yang terjadi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi implementasi kebijakan masih menjadi catatan evaluasi yang serius.
- **Ketidaksinkronan Program dan Inefisiensi:** Masih terdapat fenomena di mana perencanaan pembangunan dan perencanaan ruang dijalankan sebagai dua entitas yang terpisah tanpa dialog yang memadai. Ketidaksinkronan program kerja antar dinas ini berdampak pada inefisiensi anggaran daerah dan ketidakeraturan tata ruang kota. Jika disharmoni kebijakan ini tidak segera diidentifikasi akar permasalahannya, maka akan menghambat kemajuan daerah dan memicu konflik pemanfaatan ruang di masa depan.

Peran Kebijakan dalam Kontekstual Pembangunan Kota Malang

Kebijakan daerah di Kota Malang memegang peranan vital sebagai instrumen legal-formal dan manajerial yang mengarahkan orientasi pembangunan agar tetap konsisten pada visi jangka panjang, terutama di tengah tekanan pesatnya urbanisasi. Dalam konteks pembangunan kota, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai landasan strategis untuk memastikan bahwa akselerasi pembangunan fisik tidak mengorbankan daya dukung ekologis dan identitas sosial budaya wilayah tersebut.

Secara kontekstual, peran strategis kebijakan dalam mendukung pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan mencakup tiga fungsi utama:

- **Fungsi Regulasi dan Kepastian Hukum:** Kebijakan berperan dalam menyediakan kerangka aturan yang tegas dan mengikat bagi seluruh aktor pembangunan. Melalui instrumen seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah menetapkan zonasi yang jelas untuk memisahkan kawasan lindung, kawasan permukiman, dan pusat

aktivitas ekonomi. Hal ini krusial untuk menciptakan ketertiban fisik dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali (urban sprawl) yang sering terjadi di kota-kota besar.

- Fungsi Alokasi dan Distribusi Strategis: Kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan distribusi investasi dan prioritas pembangunan infrastruktur. Mengingat peran strategis Kota Malang sebagai pusat pendidikan, jasa, dan ekonomi kreatif berskala nasional, kebijakan harus mampu memastikan bahwa penyediaan sarana prasarana—seperti aksesibilitas transportasi dan utilitas perkotaan—terdistribusi secara merata untuk mendukung simpul-simpul produktivitas kota tanpa menciptakan ketimpangan antarwilayah.
- Fungsi Pengendalian dan Mitigasi Dampak: Kebijakan bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan setiap aktivitas pembangunan, baik yang diinisiasi oleh sektor publik maupun swasta, tetap berada dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan kebijakan pembangunan (RPJMD) memastikan bahwa target-target pertumbuhan ekonomi telah melalui uji keberlanjutan, sehingga potensi degradasi lingkungan dan risiko bencana dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan.

Melalui integrasi ketiga fungsi tersebut, kebijakan pembangunan di Kota Malang bertransformasi menjadi panduan yang adaptif dalam merespons dinamika perkotaan, sekaligus menjadi benteng dalam menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Analisis Integrasi Dokumen Kebijakan

Pembangunan Kota Malang saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan pemanfaatan ruang, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai kota pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi di wilayah Malang Raya, Kota Malang membutuhkan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perencanaan spasial memegang peran penting sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Namun, perencanaan spasial tidak akan berjalan efektif tanpa didukung tata kelola pemerintahan yang kuat, konsisten, dan transparan. Ketidaksinkronan antara kebijakan, pelaksanaan program, dan pengendalian ruang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, degradasi lingkungan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah di dalam kota.

Oleh karena itu, integrasi antara tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan. Integrasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, investasi, dan pelayanan publik berjalan sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kota Malang dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Integrasi tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial di Kota Malang dapat ditelusuri secara jelas melalui keterkaitan antara RTRW, RPJMD, dan KLHS sebagai dokumen kebijakan utama pembangunan daerah. Ketiga dokumen ini menunjukkan arah yang saling melengkapi, di mana visi pembangunan kota tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, tetapi juga keberlanjutan lingkungan serta keterpaduan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, perencanaan spasial tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pengambilan keputusan pembangunan.

RTRW Kota Malang menempatkan peran kota sebagai pusat pendidikan dan jasa berskala nasional yang didukung oleh pengembangan ekonomi, permukiman, dan infrastruktur secara terintegrasi. Strategi penguatan pusat pelayanan kota dan pengembangan infrastruktur transportasi serta utilitas menunjukkan bahwa tata ruang diarahkan untuk mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat.

Pada saat yang sama, perlindungan kawasan lindung, penambahan ruang terbuka hijau, dan pelestarian kawasan cagar budaya menegaskan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.

Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat keselarasan antara visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam tiga dokumen kebijakan utama pembangunan Kota Malang, yaitu RTRW, RPJMD, dan KLHS. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana arah pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan spasial, dokumen pembangunan daerah, serta dokumen pengendali lingkungan dapat saling mendukung dan membentuk sistem kebijakan yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum ketiga dokumen memiliki orientasi pembangunan yang relatif konsisten, khususnya dalam menekankan pentingnya pembangunan kota yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual kerangka kebijakan pembangunan Kota Malang telah dirancang untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Dari sisi visi pembangunan, RTRW menempatkan Kota Malang sebagai kota pendidikan dan jasa berskala nasional yang didukung oleh pengembangan infrastruktur dan sistem perkotaan yang terintegrasi. Visi ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi RPJMD yang mengusung konsep “Malang Mbois dan Berkelas”, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, KLHS memperkuat arah pembangunan tersebut melalui visi “Malang Bermartabat” yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologi. Kesamaan arah visi tersebut menunjukkan bahwa ketiga dokumen kebijakan memiliki landasan konseptual yang selaras dalam mendorong pembangunan kota yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan.

Pada aspek strategi pembangunan, RTRW berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengaturan struktur ruang dan pola ruang wilayah melalui penguatan pusat pelayanan kota, pengembangan jaringan transportasi, serta perlindungan kawasan lindung. RPJMD kemudian menerjemahkan arah tersebut ke dalam program pembangunan yang lebih operasional, seperti pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur kota. Sementara itu, KLHS berperan sebagai instrumen pengendali yang memastikan bahwa strategi pembangunan yang dirumuskan dalam RTRW dan RPJMD tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara ketiga dokumen tersebut dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi antara perencanaan ruang, perencanaan pembangunan, dan pengendalian lingkungan.

Tabel 1. Dokumen Pembangunan Kota Malang

Dokumen Kebijakan	Visi Misi	Strategi	Skor	Interpretasi
RTRW Kota Malang	Visi: Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan. Misi: menciptakan kota yang produktif, berdaya saing, rukun, toleran, dengan layanan publik profesional, serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, termasuk	Penguatan pusat pelayanan kota agar berfungsi optimal sebagai kota pendidikan dan jasa skala nasional serta regional. Pengembangan infrastruktur kota melalui peningkatan jaringan transportasi, utilitas, dan fasilitas pejalan kaki. Perlindungan kawasan lindung, penambahan RTH, pelestarian kawasan cagar budaya, serta pengembangan kawasan budi daya dan kawasan strategis untuk mendorong ekonomi lokal dan pariwisata.	3	RTRW merupakan dokumen utama penataan ruang yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah serta menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

penataan ruang yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

RPJMD Kota Malang	Menuju Malang Mbois dan Berkelas dengan fokus pada transformasi sosial dan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, ekonomi kreatif, infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan dan kerukunan sosial.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat. Penguatan ekonomi kreatif, UMKM, dan iklim investasi. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif.	2	RPJMD merupakan dokumen pembangunan jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas pembangunan, namun tetap harus mengacu pada RTRW.
KLHS Kota Malang	Visi: Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat dengan misi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan reformasi birokrasi.	Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD 2025–2029 melalui identifikasi isu strategis lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Memberikan rekomendasi kebijakan agar pembangunan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	3	KLHS memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi tetapi juga keseimbangan ekologi.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

Interpretasi skor:

- 1 = Rendah → integrasi masih lemah dan belum didukung mekanisme yang jelas
- 2 = Sedang → integrasi sudah berjalan tetapi belum optimal
- 3 = Tinggi → integrasi berjalan kuat dan menjadi bagian dari sistem perencanaan

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa integrasi antara dokumen kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan pada tahap implementasi. Walaupun visi dan strategi pembangunan menunjukkan tingkat keselarasan yang cukup kuat, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya potensi ketidaksinkronan antara rencana pemanfaatan ruang dengan program pembangunan sektoral yang dijalankan oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil analisis komparatif tersebut, tingkat integrasi kebijakan kemudian dinilai menggunakan skoring dengan rentang nilai 1–3, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat integrasi rendah, nilai 2 menunjukkan integrasi sedang, dan nilai 3 menunjukkan integrasi tinggi, dengan mempertimbangkan kesesuaian visi pembangunan, keterkaitan strategi, serta peran masing-masing dokumen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Arah RTRW tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin konsistensi antara rencana dan implementasi di lapangan. Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, pengendalian

pemanfaatan ruang berisiko tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan sektoral, perizinan, dan program pembangunan selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

RPJMD Kota Malang memperkuat arah pembangunan tersebut melalui visi “Menuju Malang Mbois dan Berkelas” yang menekankan transformasi sosial dan ekonomi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan infrastruktur menunjukkan adanya kesinambungan dengan strategi RTRW. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan pembangunan jangka menengah dan pengaturan ruang, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Strategi dalam RPJMD juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan fisik kota tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana, tetapi juga pada peningkatan daya dukung lingkungan dan kenyamanan ruang kota. Integrasi ini menuntut koordinasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur tidak bertentangan dengan fungsi lindung dan struktur ruang kota.

Sementara itu, KLHS berperan sebagai instrumen pengaman keberlanjutan dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui identifikasi isu strategis lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, KLHS memastikan bahwa arah kebijakan RPJMD dan RTRW tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendekatan sistematis dan partisipatif dalam KLHS memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Secara keseluruhan, integrasi RTRW, RPJMD, dan KLHS mencerminkan upaya Kota Malang dalam menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan perencanaan spasial untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keselarasan visi, misi, dan strategi dalam ketiga dokumen tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya kota yang produktif, berdaya saing, dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Integrasi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan Kota Malang yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sinergi Tata Kelola dan Perencanaan Spasial

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan instrumen perencanaan yang komprehensif di Kota Malang, seperti RTRW dan RPJMD, belum menjadi jaminan mutlak keberhasilan pembangunan tanpa adanya sinergi yang kuat antara tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial. Tata kelola pemerintahan menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi, sementara perencanaan spasial menerjemahkannya ke dalam alokasi ruang fisik yang tertib. Perencanaan spasial membutuhkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap izin pemanfaatan ruang serta realisasi pembangunan di lapangan tetap konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa keterpaduan ini, arah pembangunan kota akan kehilangan orientasi dan berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta degradasi lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan integrasi untuk mendukung pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan meliputi tiga pilar utama:

- **Pemanfaatan Data Spasial Berkualitas Tinggi:** Pemanfaatan data spasial yang akurat dan berkualitas tinggi menjadi solusi teknis untuk menjembatani kesenjangan antara dokumen perencanaan legal-formal dengan realitas fisik di lapangan. Data yang presisi merupakan basis utama dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran, sehingga meminimalisir kesalahan alokasi ruang dan tumpang tindih kebijakan.
- **Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi:** Sinergi dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Fokus utama adalah menghilangkan hambatan struktural maupun fungsional melalui koordinasi lintas sektoral yang intensif antar dinas. Hal ini diperlukan untuk menghapus ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat utama dalam menerjemahkan rencana spasial menjadi aksi pembangunan yang konkret.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengubah paradigma perencanaan dari sekadar *top-down* menjadi lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Pelibatan publik yang lebih luas diyakini dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) serta memperkuat kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan kota, sehingga aspirasi lokal dapat terakomodasi dalam kebijakan spasial.

Secara keseluruhan, keselarasan visi antara "Malang Bermartabat" (KLHS) dan "Malang Mbois" (RPJMD) memberikan landasan kebijakan yang kuat bagi masa depan kota. Integrasi yang solid antara tata kelola dan perencanaan spasial menjadi kunci utama untuk mewujudkan Kota Malang yang tidak hanya maju secara ekonomi melalui sektor pendidikan dan jasa, tetapi juga adil, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Model Integrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan Spasial dalam Mendukung Pembangunan Kota Malang yang Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen kebijakan dan dinamika pembangunan di lapangan, penelitian ini merumuskan sebuah model integrasi yang mensinergikan tata kelola pemerintahan (aspek manajerial-kebijakan) dengan perencanaan spasial (aspek teknis-ruang). Model ini dirancang untuk menjawab tantangan ego sektoral dan ketidaksinkronan program yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan di Kota Malang.

Model integrasi ini bertumpu pada tiga komponen utama yang saling mengikat:

- Sinkronisasi Dokumen Kebijakan (Core Alignment): Model ini menempatkan RTRW, RPJMD, dan KLHS dalam satu kesatuan hierarki yang tidak terpisahkan. RTRW berfungsi sebagai navigasi fisik, RPJMD sebagai penggerak operasional, dan KLHS sebagai instrumen pengaman ekologis. Integrasi ini memastikan visi "Malang Mbois" dan "Malang Bermartabat" tidak hanya berhenti pada jargon politik, tetapi terwujud dalam alokasi ruang yang tertib dan berkelanjutan.
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Strengthening): Model ini mengedepankan kolaborasi lintas sektoral sebagai mesin penggerak tata kelola. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan sekat-sekat birokrasi antar dinas melalui forum koordinasi yang berkelanjutan, sehingga perencanaan pembangunan dan perencanaan ruang tidak lagi berjalan sebagai dua entitas yang terpisah.
- Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Data dan Partisipasi (Decision Support System): Pemanfaatan data spasial berkualitas tinggi digunakan sebagai jembatan teknis untuk meminimalisir kesenjangan antara rencana di atas kertas dengan realitas fisik di lapangan. Komponen ini diperkuat dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang inklusif untuk menjamin adanya kontrol sosial dan akomodasi aspirasi lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Implementasi model ini secara utuh di Kota Malang akan menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari terciptanya harmoni antara kemajuan fisik perkotaan dengan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat integrasi antara kebijakan tata kelola pemerintahan dan perencanaan spasial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual integrasi kebijakan telah tercermin dalam keselarasan visi, misi, dan strategi pada dokumen RTRW, RPJMD, dan KLHS yang sama-sama menekankan pembangunan kota yang berdaya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan hidup. Analisis komparatif dengan sistem skoring menunjukkan bahwa tingkat integrasi kebijakan berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang mengindikasikan bahwa kerangka perencanaan pembangunan Kota Malang telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian,

implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta sinkronisasi antara rencana tata ruang dan program pembangunan sektoral. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola pemerintahan dalam mengintegrasikan kebijakan pada tahap pelaksanaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mekanisme implementasi integrasi kebijakan di tingkat kelembagaan serta mengembangkan metode analisis yang lebih kuantitatif atau berbasis spasial agar pengukuran tingkat integrasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengapresiasi dalam melakukan penulisan jurnal ini, kiranya dalam jurnal ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadikan pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasddin, I., Hut, S., Sari Octavia, S. T., Sutrisno, I. A., ST, M., Gani, P. J. A., ... & PWK, S. P. M. (2025). *DINAMIKA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW): Sejarah, Teori, & Peninjauan Ulang RTRW*. Madani Kreatif Publisher.
- Izzuddin, F. N. (2022). Konsep smart city dalam pembangunan berkelanjutan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 376-382.
- Maisarah, P. A., Fonna, F., & Firdaus, R. (2025). Peran kritis sistem informasi manajemen dalam mewujudkan e-Government yang responsif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(3).
- Pratama, F. W. N., Annisadina, T., & Fernanda, B. (2025). Peninjauan Perencanaan Spasial dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Kota Tambang: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin. *Tunas Agraria*, 8(1), 54-75.
- Rahmani, D. R., Caesarina, H. M., Aini, Q., & Noor, R. (2025). *Manajemen Lingkungan Kota*. UrbanGreen Central Media.
- Rahmawati, R., Said, M. U., & Sekarsari, R. W. (2024). Peran pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan ruang terbuka hijau dengan pendekatan konsep collaborative governance. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(2), 728-739.
- Rice, M., Iriani, N. I., & Hidayat, I. (2022). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kota Malang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang).
- Suharto, D. G., & Tiemority, D. R. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 47-56.
- Thahir, B. (2023). Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102-115.
- Tifani, N. (2025). Optimalisasi Kerja Sama Lintas Dinas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(3), 241-252.
- Widnyani, I. A. P. S. (2025). *Transformasi Perencanaan Pembangunan melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. Deepublish.
- Yuliana, D. (2025). Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peningkatan Tata Kelola Sampah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan*

Nama Akhir penulis/2 kata paling depan dari judul

Humaniora, 3(1), 94-103.

Zhang, A. (2025). Analysis of the Sustainable Development Pathway of Urban–Rural Integration from the Perspective of Spatial Planning: A Case Study of the Urban–Rural Fringe of Beijing. *Sustainability*, 17(5).